



**Journal of Human And Education**  
Volume 5, No. 2, Tahun 2025, pp 485-496  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa Sebagai Media Literasi Informasi Bencana**

**Encang Saepudin<sup>1\*</sup> Ninis Agustini Damayani<sup>2</sup>, Agus Rusmana<sup>3</sup>**

Universitas Padjadjaran  
Email: [encang@unpad.ac.id](mailto:encang@unpad.ac.id)<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Perpustakaan desa sebagai pusat informasi memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup dan membantu memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat desa. Namun, masih banyak perpustakaan desa yang kondisinya sederhana dan memiliki keterbatasan dalam pengelolaannya, khususnya dalam pengelolaan koleksi bahan pustaka dan pelaksanaan layanan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pelatihan pengelolaan perpustakaan desa sebagai media literasi informasi bencana bertujuan memberi pengetahuan dan keterampilan kepada para pengelola perpustakaan desa tentang pengumpulan sumber informasi kebencanaan; pengolahan sumber informasi kebencanaan, dan penyebaran sumber informasi kebencanaan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk melakukan pemetaan sosial dalam menetapkan pokok permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran. Sedangkan metode pelaksanaan pelatihan yakni ceramah, diskusi, dan praktek. Hasil pelaksanaan pengabdian pada masyarakat adalah dengan dilaksanakannya diskusi dengan masyarakat dalam upaya pemetaan sosial, serta penyampaian materi pokok tentang pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, dan pelayanan perpustakaan para peserta menjadi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang proses pengumpulan sumber informasi kebencanaan; pengolahan sumber informasi kebencanaan, dan penyebaran sumber informasi kebencanaan melalui berbagai bentuk layanan perpustakaan desa. Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yaitu para pengelola perpustakaan desa terampil dalam mengelola perpustakaan sebagai pusat sumber informasi kebencanaan.

**Kata kunci;** *Literasi Informasi; Informasi Bencana; Perpustakaan*

### **Abstract**

Village libraries as information centers have an important role in improving the quality of life and helping to solve problems in rural communities. However, there are still many village libraries that are in simple conditions and have limitations in their management, especially in managing library collections and implementing services. The implementation of community service with the theme of village library management training as a medium for disaster information literacy aims to provide knowledge and skills to village library managers about collecting disaster information sources; processing disaster information sources, and disseminating disaster information sources. The method used in implementing community service is *Participatory Rural Appraisal* (PRA) to conduct social mapping in determining the main problems faced by the target community. While the training implementation methods are lectures, discussions, and practices. The results of implementing community service are by holding discussions with the community in an effort to social map, as well as delivering basic materials on collection development, processing library materials, and library services, participants have knowledge and skills about the process of collecting disaster information sources; processing disaster

information sources, and disseminating disaster information sources through various forms of village library services. The conclusion from the implementation of community service is that village library managers are skilled in managing libraries as centers for disaster information sources.

**Keywords;** *Information Literacy; Disaster Information; Library*

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Pangandaran secara geografis memiliki wilayah yang terdiri dari laut, kawasan pegunungan, serta hutan. Dengan kondisi geografis seperti ini, daerah tersebut memiliki potensi mengalami berbagai bencana alam, antara lain tsunami, gempa bumi, pergeseran tanah, tanah longsor, banjir, dan angin topan. Menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran, wilayah ini menempati posisi ke-11 di Jawa Barat dalam hal tingkat risiko bencana. Sedangkan di tingkat nasional (wilayah Indonesia) Kabupaten Pangandaran menduduki peringkat ke-16 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 105 peristiwa bencana terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPBD tahun yang sama, terdapat sepuluh kecamatan dengan tingkat risiko bencana tertinggi, yaitu Cijulang, Cimerak, Parigi, Cigugur, Langkaplancar, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya (BPBD, 2022). Wilayah Kabupaten Pangandaran memiliki potensi bencana yang tersebar di berbagai kawasan, mulai dari perbukitan, dataran seperti area pesawahan dan permukiman, hingga fasilitas umum, kantor pemerintahan, dan wilayah pesisir pantai. Namun demikian, sarana dan prasarana penanggulangan bencana di wilayah ini masih sangat terbatas. Jika dibandingkan dengan 27 kabupaten/kota lain di Jawa Barat, kesiapan alat dan infrastruktur kebencanaan di Pangandaran masih jauh dari standar ideal. Keterbatasan ini disebabkan oleh status BPBD Pangandaran yang masih baru serta kapasitas daerah yang belum optimal (Subekti, 2022).

Keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan berdampak besar terhadap upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Keterbatasan peralatan seperti sistem peringatan dini, kendaraan evakuasi, jalur dan tempat evakuasi, serta pusat koordinasi darurat, akan berakibat pada respon bencana menjadi lambat dan tidak terorganisir. Hal ini bisa berakibat besar terhadap jatuhnya korban dan kerusakan. Keterbatasan infrastruktur akan menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan pelatihan kebencanaan, sehingga mereka cenderung tidak siap saat bencana terjadi. Selain itu, kurangnya fasilitas logistik dan perlindungan pascabencana akan memperburuk kondisi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Literasi kebencanaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Upaya ini harus dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, melalui lembaga terkait, berperan dalam membentuk literasi kebencanaan melalui kebijakan seperti peraturan daerah. Sementara itu, tokoh masyarakat berkontribusi lewat penyampaian pesan-pesan moral, sosial, dan spiritual. Salah satu program nyata dalam penguatan literasi ini adalah pemanfaatan perpustakaan desa sebagai pusat informasi kebencanaan bagi masyarakat.

Pelaksanaan literasi kebencanaan di masyarakat Kabupaten Pangandaran dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terencana dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu bentuk penerapannya adalah pengintegrasian literasi kebencanaan ke dalam pendidikan formal melalui program mitigasi bencana. Program ini mengajak keterlibatan aktif guru, siswa, dan masyarakat dalam proses pembelajaran yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan seperti daerah pesisir. Integrasi ini bertujuan membentuk kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan sejak usia dini serta mengembangkan kemampuan individu dalam merespons secara cepat dan tepat saat terjadi keadaan darurat.

Perpustakaan desa memiliki peran strategis sebagai pusat informasi dan wadah komunitas, dengan tugas utama menyediakan sumber informasi yang memadai serta relevan terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat desa. Perpustakaan yang dikelola secara efektif berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas

hidup dan kesejahteraan warga desa. Sebagai institusi penyedia informasi yang telah diseleksi, perpustakaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran layanannya. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan harus mampu menjawab kebutuhan informasi para penggunanya secara optimal. Fujiwara, Lawton, & Mourato (2019) menekankan bahwa perpustakaan memainkan peranan sosial yang penting, tidak hanya sebagai repositori pengetahuan dan sarana pengembangan pendidikan, tetapi juga sebagai ruang komunitas yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, perpustakaan harus menjalankan fungsinya secara strategis dalam tatanan kehidupan sosial. Perpustakaan juga berperan sebagai media pengembangan intelektual masyarakat, sehingga pengembangannya idealnya sejalan dengan pembangunan di bidang pendidikan dan pembentukan karakter.

Perpustakaan dituntut untuk menyediakan berbagai bentuk layanan, mengingat sebagian besar akses terhadap layanannya diberikan secara terbuka dan tanpa biaya. Selain itu, perpustakaan juga harus mampu memberikan dampak langsung bagi pemustaka, seperti berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka melalui berbagai layanan yang disediakan (Fujiwara, Lawton, & Mourato, 2019). Perpustakaan umum, sebagai institusi yang melayani seluruh lapisan masyarakat, memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kualitas hidup setiap individu. Irsan (2019) mengemukakan bahwa jika sebelumnya perpustakaan lebih berfokus pada aspek teknis dan administratif, maka kini sudah saatnya perpustakaan bertransformasi menjadi ruang yang inklusif dengan memperhatikan dimensi sosial dan budaya, sehingga mampu menarik minat masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memanfaatkannya. Konsep inklusi sosial mengacu pada kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya, peluang, serta kesempatan untuk belajar, bekerja, berpartisipasi, dan menyuarakan pendapat (Bridge & Carnemolla, 2014). Selanjutnya, Ayoung, Bugre, & Baada (2020) menyatakan bahwa perpustakaan umum terus melakukan inovasi dalam menjangkau dan melayani masyarakat guna mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini juga berlaku bagi perpustakaan desa, sebagai bagian dari jaringan perpustakaan umum yang berlokasi di wilayah pedesaan. Kepala perpustakaan dan pustakawan diharapkan proaktif dalam menjangkau dan menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Di samping itu, perpustakaan umum memiliki peran penting dalam mendampingi pemustaka yang menghadapi kendala sosial dalam mengakses layanan informasi.

Pelatihan perpustakaan desa merupakan salah satu solusi penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang dihadapi oleh perpustakaan. Mengingat pengelola perpustakaan desa umumnya berasal dari perangkat desa atau relawan tanpa latar belakang kepustakawanan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen perpustakaan, pengelolaan koleksi, dan pelayanan informasi. Melalui pelatihan, pengelola diberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, seperti pengklasifikasian buku, peminjaman, hingga pemanfaatan teknologi informasi sederhana. Hal ini memungkinkan pengelola untuk menjalankan fungsi perpustakaan secara lebih efektif meskipun terbatasnya jumlah sumberdaya manusia. Selain itu, pelatihan juga memberikan solusi terhadap keterbatasan fasilitas perpustakaan. Dalam hal ini, peserta pelatihan diajarkan untuk memanfaatkan ruang yang ada di desa, seperti balai desa atau posyandu, sebagai tempat membaca alternatif. Inovasi semacam ini memungkinkan perpustakaan tetap berfungsi optimal meskipun dengan sarana dan prasarana terbatas

Secara ideal, perpustakaan desa diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perpustakaan desa masih berada dalam kondisi yang kurang memadai, dikelola secara terbatas dengan berbagai kekurangan. Kendala yang dihadapi mencakup minimnya sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, serta dukungan keuangan yang belum optimal. Akibatnya, layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat pun masih sangat terbatas, yang berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh warga desa. Padahal, perpustakaan desa seharusnya berfungsi sebagai pusat informasi yang dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungannya. Ozili (2020) mengemukakan bahwa terdapat tujuh indikator inklusi sosial yang dapat diidentifikasi melalui kebijakan dan kajian akademik, yakni kesetaraan gender,

keadilan dalam distribusi sumber daya publik, pembangunan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, penghapusan diskriminasi, pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan teknologi sosial.

Salah satu peran strategis yang dapat diemban oleh perpustakaan desa, khususnya di daerah yang tergolong rawan bencana, adalah sebagai pusat informasi kebencanaan. Dalam kapasitas ini, perpustakaan desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan diseminasi informasi yang relevan dan akurat mengenai potensi, risiko, serta penanganan bencana. Ketersediaan informasi kebencanaan yang mudah diakses oleh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas adaptif warga dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Literasi dalam konteks ini memiliki makna yang lebih luas dari sekadar kemampuan dasar membaca dan menulis. *National Institute for Literacy* mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, serta memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Dengan demikian, literasi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan responsif terhadap perubahan serta tantangan, termasuk dalam menghadapi bencana.

Lebih khusus lagi, Brown, Haun, & Peterson (2014) memperkenalkan konsep literasi kebencanaan, yang merujuk pada kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi terkait kebencanaan secara efektif. Informasi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus dapat diterapkan dalam konteks nyata, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, hingga tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana. Oleh karena itu, perpustakaan desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam mendukung upaya literasi kebencanaan melalui pengadaan koleksi informasi tematik, penyelenggaraan program edukatif, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga kebencanaan dan komunitas lokal.

Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, perpustakaan desa dapat menjadi media yang efektif dalam menyebarkan pengetahuan kebencanaan kepada semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Perpustakaan desa dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk kelompok rentan, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang sesuai dengan kondisi setempat. Untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau, perpustakaan desa bisa menggunakan konsep perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ini dapat menggunakan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan koleksi buku, materi pendidikan, dan fasilitas digital. Selain menyediakan bahan bacaan, kendaraan ini juga dapat mengadakan kegiatan literasi dan pelatihan di setiap desa atau dusun. Konsep ini sangat efektif untuk menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak di daerah pedesaan yang sulit mengakses perpustakaan atau masyarakat lanjut usia yang tinggal jauh dari pusat desa.

Selain itu, Perpustakaan desa dapat menjadi pusat informasi kebencanaan yang terhubung dengan lembaga kebencanaan. Saat terjadi bencana, perpustakaan dapat menyediakan akses informasi yang relevan, seperti peta evakuasi, informasi tempat pengungsian, atau prosedur penanggulangan bencana yang terus diperbarui. Kolaborasi ini juga dapat mencakup penyediaan jalur komunikasi, seperti pesan teks atau media sosial, untuk menyebarkan informasi kritis kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin-poin yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, pendidikan berkualitas, dan penguatan komunitas.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas perpustakaan desa dalam bidang literasi kebencanaan merupakan langkah strategis yang patut mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa Sebagai Media Literasi Informasi Bencana* adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para pengelola perpustakaan desa serta taman bacaan masyarakat. Fokus utama kegiatan ini meliputi pelatihan dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan sumber-sumber

informasi terkait kebencanaan.

## **METODE**

Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan pendekatan partisipatif yang digunakan secara sistematis dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Saepudin, 2023). Metode ini diterapkan melalui beberapa tahapan strategis yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Tahap pertama dimulai dengan pengenalan terhadap masalah, kebutuhan, dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sasaran. Setelah itu, dilakukan perumusan masalah serta penetapan skala prioritas, guna merumuskan isu-isu utama yang paling mendesak untuk ditangani berdasarkan temuan awal dan potensi lokal yang tersedia.

Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap alternatif pemecahan masalah yang diperoleh melalui forum diskusi dan musyawarah bersama masyarakat. Dari hasil diskusi tersebut, kemudian dipilih alternatif pemecahan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan kemampuan serta sumber daya lokal yang tersedia, termasuk aspek swadaya masyarakat. Setelah alternatif solusi ditentukan, dilakukan perencanaan secara konkret terhadap pelaksanaan gagasan tersebut agar memudahkan proses implementasi dan pemantauan. Selanjutnya, disusun rencana kegiatan yang lebih rinci guna memperoleh masukan dari pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengorganisasian masyarakat yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan yang ada. Dalam tahap pelaksanaan ini juga dilakukan pemantauan dan pengarahan agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana. Terakhir, dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk penyusunan rencana tindak lanjut untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai, masalah yang berhasil diselesaikan, serta potensi permasalahan baru yang muncul sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya sistematis untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat dalam hal literasi kebencanaan melalui optimalisasi pengelolaan perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses pencarian data lapangan sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan potensi lokal. Data dikumpulkan dengan menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta kondisi aktual pengelolaan informasi di perpustakaan desa. Data tersebut menjadi pijakan penting untuk menyusun materi pelatihan yang relevan dan aplikatif.

Pada tahap pelaksanaan, tim pengabdian menyampaikan materi melalui kombinasi metode ceramah interaktif dan praktik langsung agar peserta memperoleh pemahaman teoritis sekaligus keterampilan praktis. Materi yang disampaikan mencakup manajemen koleksi perpustakaan, teknik pengolahan bahan pustaka, serta strategi layanan informasi kebencanaan. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui diskusi interaktif menggunakan aplikasi Zoom Meeting, di mana metode wawancara digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam tantangan dan peluang dalam pengelolaan perpustakaan sebagai pusat informasi mitigasi bencana. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan divalidasi dengan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan pengamatan langsung. Tahapan evaluasi dilakukan secara menyeluruh guna mengukur efektivitas program serta merumuskan tindak lanjut yang relevan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat ke depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemetaan Sosial**

Diskusi yang dilaksanakan bersama para mitra memiliki tujuan yaitu melakukan pemetaan sosial secara komprehensif terhadap kondisi masyarakat sasaran, termasuk dalam mengidentifikasi karakteristik sosial, budaya, ekonomi, serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat terkait kebencanaan. Melalui proses diskusi ini, tim pengabdian kepada masyarakat dapat menggali secara lebih mendalam potensi yang dapat dikembangkan serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam membangun

kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu kebencanaan. Pemetaan ini menjadi dasar yang penting untuk merumuskan strategi intervensi, menentukan materi pelatihan yang relevan, dan memilih pendekatan yang tepat agar program dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Literasi kebencanaan, sebagaimana dijelaskan oleh Brown, Haun, & Peterson (2014), tidak hanya mencakup pemahaman konseptual, tetapi juga mencerminkan kemampuan praktis individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi terkait bencana secara tepat. Literasi ini menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang tangguh, karena memungkinkan warga untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap potensi bencana, serta berperan aktif dalam setiap tahap manajemen bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat cenderung rentan terhadap disinformasi, kepanikan, dan kurangnya kemampuan untuk bertindak secara mandiri saat terjadi situasi darurat.

Dalam konteks ini, perpustakaan desa memiliki posisi yang sangat strategis. Melalui pelatihan pengelolaan perpustakaan yang difokuskan pada penguatan fungsi informatif, khususnya terkait dengan pencarian, pengolahan, dan penyebaran informasi kebencanaan, perpustakaan dapat menjadi pusat informasi yang inklusif dan terpercaya di tengah masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis pengelolaan koleksi, tetapi juga pada kemampuan pustakawan atau pengelola dalam merancang layanan yang edukatif dan komunikatif, sehingga informasi kebencanaan dapat diterima secara luas oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses atau tingkat literasi dasar yang rendah.

Dengan tersedianya layanan informasi kebencanaan yang mudah diakses, akurat, dan relevan, perpustakaan desa diharapkan mampu membentuk masyarakat yang memiliki tingkat kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi. Warga tidak hanya mengetahui potensi bencana di lingkungan sekitarnya, tetapi juga memahami langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi, tindakan yang perlu diambil saat bencana berlangsung, serta proses pemulihan setelah bencana. Peran ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek pengurangan risiko bencana, peningkatan pendidikan inklusif, dan penguatan ketahanan komunitas lokal.

Dengan demikian, sinergi antara penguatan kapasitas perpustakaan desa, keterlibatan aktif masyarakat, dan pendekatan literasi kebencanaan yang partisipatif menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat desa yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.

### **Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui dua skema pelaksanaan utama, yaitu: (a) terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, dan (b) dilakukan secara mandiri oleh tim pelaksana pengabdian. Skema integrasi dengan KKN memungkinkan kegiatan pengabdian tidak hanya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran langsung bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama studi. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga turut aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian yang terintegrasi dengan KKN dilakukan secara daring (online), menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ada, termasuk pembatasan mobilitas dan perlunya efisiensi koordinasi lintas lokasi. Seluruh tahapan kegiatan—mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan materi, penyelenggaraan program, hingga pelaporan hasil—melibatkan mahasiswa sebagai mitra aktif. Keterlibatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian sosial, kemampuan kerja tim, serta keterampilan komunikasi dan manajerial mahasiswa.

Untuk mendukung efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan program daring, tim pengabdian memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi. Aplikasi yang digunakan antara lain WhatsApp sebagai media komunikasi cepat dan informal; Google Classroom untuk pengelolaan dokumen, materi, dan tugas; Zoom Meeting untuk rapat koordinasi, diskusi, dan pelatihan daring; serta Trello sebagai alat

bantu manajemen proyek yang memungkinkan tim mengelola aktivitas secara sistematis. Integrasi berbagai media ini memberikan fleksibilitas serta mendukung efisiensi kerja tim lintas lokasi dan waktu.

Koordinasi antara tim pelaksana dan mahasiswa dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, dengan penjadwalan yang disesuaikan agar tidak mengganggu kegiatan akademik utama mahasiswa. Melalui komunikasi intensif ini, setiap perkembangan kegiatan dapat dimonitor secara real-time, kendala yang muncul dapat segera diatasi, serta umpan balik dari mahasiswa dan mitra masyarakat dapat langsung direspons dan ditindaklanjuti. Pendekatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat, serta menjamin keberlangsungan program yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Dengan memadukan keterlibatan mahasiswa, penggunaan teknologi digital, serta pengelolaan program yang sistematis, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dapat menjangkau lebih luas, tetapi juga memberikan dampak yang lebih bermakna bagi masyarakat sasaran maupun bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

Mengacu pada kebijakan strategis yang diterapkan oleh pihak universitas, seluruh mahasiswa yang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelompok dalam skala kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pemberdayaan masyarakat secara langsung, sekaligus mengembangkan kemampuan kolaboratif, komunikasi, dan problem solving di lingkungan nyata. Dalam praktiknya, kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam tiga tahap, dengan dua kegiatan utama dikoordinasikan oleh mahasiswa dalam kelompok kecil, dan satu kegiatan lainnya dilaksanakan di bawah koordinasi langsung tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PPM).

Penerapan skema pelaksanaan ini dirancang untuk memberikan ruang partisipatif yang luas bagi mahasiswa, namun tetap dalam koridor yang terstruktur dan terarah. Oleh karena itu, penting bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN untuk tetap mengacu pada tema besar pengabdian yang telah ditetapkan oleh tim PPM atau Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Keselarasan tema ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa kegiatan mahasiswa mendukung pencapaian tujuan pengabdian secara menyeluruh, baik dari aspek substansi, relevansi isu, maupun kebermanfaatannya bagi masyarakat sasaran.

Tema utama yang diangkat oleh tim PPM dalam kegiatan pengabdian kali ini adalah *Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Desa Sebagai Media Literasi Informasi Bencana*. Tema ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat sasaran yang berada di wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, serta rendahnya tingkat literasi informasi kebencanaan di kalangan masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, perpustakaan desa tidak hanya diposisikan sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran informasi yang relevan, khususnya dalam konteks kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dengan menjadikan tema tersebut sebagai acuan utama, kegiatan mahasiswa KKN diarahkan untuk merancang program-program turunan yang mendukung penguatan kapasitas literasi masyarakat terhadap isu kebencanaan. Misalnya, dengan melakukan pelatihan pencarian informasi kebencanaan, pembuatan media informasi visual yang mudah dipahami, ataupun menyelenggarakan diskusi komunitas berbasis perpustakaan. Kegiatan ini juga sekaligus membentuk pola kerja kolaboratif antara mahasiswa, tim pengabdian, dan masyarakat lokal, yang diharapkan dapat menghasilkan dampak nyata, baik dalam peningkatan literasi, kesiapsiagaan bencana, maupun penguatan fungsi sosial perpustakaan desa.

Dengan integrasi yang kuat antara pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan program tim PPM, seluruh rangkaian pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberi kontribusi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi tantangan kebencanaan.

Sebagaimana tercantum dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengelolaan perpustakaan desa atau taman bacaan, materi utama yang disampaikan mencakup tiga pokok bahasan, yakni konsep pengembangan

koleksi, proses pengolahan bahan pustaka, serta penyelenggaraan layanan perpustakaan. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan secara menyeluruh. Berikut ini disajikan uraian singkat mengenai materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **1. Pengembangan koleksi**

Pengembangan koleksi yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui proses seleksi bahan pustaka yang tepat dan terarah. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan pedoman yang jelas dan sistematis sebagai acuan dalam pengembangan koleksi. Keberadaan kebijakan resmi mengenai pengembangan koleksi yang disahkan oleh lembaga akan memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung inventarisasi koleksi. Selain itu, perpustakaan juga memiliki kewenangan untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal lembaga, guna memperkaya koleksinya.

Dalam melakukan pengembangan koleksi, terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan landasan utama, antara lain relevansi terhadap kebutuhan pengguna, kelengkapan informasi, kemutakhiran isi, serta keterbukaan terhadap kolaborasi. Proses pemilihan bahan pustaka harus memperhitungkan prinsip-prinsip tersebut agar koleksi yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Secara umum, pengembangan koleksi meliputi kegiatan analisis terhadap kebutuhan pengguna, penyusunan kebijakan koleksi, proses seleksi, akuisisi atau pengadaan, penyiangan koleksi (*weeding*), serta evaluasi berkala. Mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP 006:2011), pengembangan koleksi menekankan dua hal penting: (1) setiap perpustakaan harus memiliki kebijakan tertulis mengenai pengembangan koleksi, dan (2) terdapat ketentuan minimal penambahan judul buku sebesar 5% per tahun dari jumlah koleksi yang ada. Sejalan dengan itu, Gunawan (2017) menegaskan bahwa pengembangan koleksi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan dengan menyediakan bahan pustaka yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tujuan utama dari pengembangan koleksi adalah untuk menciptakan keselarasan dan keberagaman koleksi yang mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat yang terus berkembang, baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa yang akan datang. Di samping itu, pengembangan ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa koleksi perpustakaan selalu relevan, cukup dalam jumlah, serta bermutu tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas perpustakaan secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, proses seleksi bahan pustaka harus dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan tujuan perpustakaan. Kegiatan ini mencakup proses evaluasi terhadap bahan pustaka yang akan dipilih, yang disesuaikan dengan pedoman koleksi perpustakaan. Dalam *Pedoman Pembinaan Koleksi Perpustakaan* (Siregar, 1999), disebutkan bahwa metode seleksi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu berdasarkan kebutuhan pengguna, menggunakan alat bantu seleksi, serta melalui evaluasi langsung terhadap bahan pustaka.

Untuk memastikan bahan pustaka yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas yang baik, diperlukan alat bantu seleksi. Alat bantu tersebut memudahkan pustakawan dalam menentukan bahan pustaka yang akan ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan. Beberapa alat bantu yang umum digunakan antara lain katalog penerbit, daftar bibliografi, resensi buku, dan pangkalan data penerbit. Dalam konteks perpustakaan yang telah mengalami transformasi, pustakawan tidak hanya bertindak sebagai pengelola koleksi, tetapi juga sebagai fasilitator informasi yang aktif membantu pemustaka dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan (Utami & Prasetyo, 2019).

Proses seleksi bahan pustaka juga harus memperhatikan unsur kebaruan (kemutakhiran), terutama dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Koleksi yang diadakan sebaiknya merupakan edisi terbaru atau relevan dengan perkembangan terkini, di mana tahun terbit menjadi indikator penting dalam menilai mutakhir atau tidaknya suatu koleksi.

Aspek penting lainnya adalah kelengkapan, yang mencakup dua dimensi: jenis bahan pustaka dan kelengkapan isi informasi. Jenis bahan pustaka tidak hanya terbatas

pada bentuk cetak, tetapi juga mencakup media lainnya seperti audio, audiovisual, dan digital. Sementara itu, kelengkapan informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi DDC (Dewey Decimal Classification), mulai dari kelas 000 hingga kelas 900.

Unsur terakhir yang harus diperhatikan dalam pengembangan koleksi adalah kolaborasi. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak—baik dari lembaga induk, instansi lain, maupun penerbit—proses pengembangan koleksi akan berjalan lebih efisien dan efektif. Hubungan kerja sama yang harmonis ini menjadi kunci keberhasilan dalam menyediakan koleksi yang komprehensif, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna perpustakaan.

## 2. Pengolahan Bahan Pustaka

Pengolahan bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan utama dalam manajemen perpustakaan yang memiliki peran sentral. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memudahkan pencarian informasi oleh pengguna serta untuk mendukung ketertiban administrasi dalam pengelolaan koleksi. Secara umum, terdapat empat tahapan penting dalam proses pengolahan bahan pustaka, yaitu inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan penyusunan di rak (*shelving*).

Tahapan awal adalah inventarisasi, yakni proses pencatatan formal terhadap bahan pustaka yang telah ditetapkan sebagai bagian dari koleksi perpustakaan. Inventarisasi dilakukan untuk mendokumentasikan jumlah koleksi yang dimiliki serta asal-usul perolehan bahan pustaka tersebut. Dalam proses ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, meliputi pemeriksaan kondisi bahan pustaka, pengelompokan berdasarkan jenis atau subjek, pemberian cap kepemilikan, dan pencatatan ke dalam buku atau sistem inventaris.

Tahap berikutnya adalah klasifikasi, yaitu proses pengelompokan bahan pustaka berdasarkan topik atau isi yang terkandung di dalamnya. Sistem klasifikasi yang paling umum digunakan di berbagai perpustakaan adalah Dewey Decimal Classification (DDC). Melalui sistem ini, setiap bahan pustaka diberikan nomor klasifikasi yang merepresentasikan subjek utamanya. Nomor ini sekaligus berfungsi sebagai nomor panggil (*call number*) yang akan memudahkan pengguna dalam menelusuri dan menemukan bahan pustaka di rak. Label nomor panggil biasanya ditempelkan pada bagian punggung buku untuk memudahkan identifikasi secara fisik.

Pelabelan (*labelling*) merupakan bagian dari proses pengolahan koleksi buku di perpustakaan yang dilakukan dengan menempelkan kode identifikasi tertentu pada bahan pustaka. Kode ini umumnya terdiri atas nomor klasifikasi dan nomor buku, yang telah ditentukan sebelumnya. Nomor buku tersebut dapat disusun berdasarkan berbagai pendekatan, seperti urutan subjek, ketebalan buku, atau metode lainnya. Namun secara umum, nomor buku ditentukan berdasarkan urutan masuknya buku ke dalam koleksi perpustakaan.

Sementara itu, katalogisasi adalah proses penyusunan daftar bibliografi yang mencakup berbagai jenis koleksi perpustakaan, seperti buku, majalah, CD, hingga film mikro. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendokumentasikan semua koleksi yang dimiliki perpustakaan, mempermudah pencarian kembali informasi oleh pengguna, serta mendukung pengembangan standar bibliografi internasional (Lasa, 2007). Format katalog yang digunakan dapat bervariasi, mulai dari katalog cetak, katalog berkas, katalog kartu, hingga katalog digital yang dikenal dengan istilah OPAC (*Online Public Access Catalog*). Masing-masing jenis katalog memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri dalam penggunaannya.

Tahapan terakhir dalam proses pengolahan bahan pustaka adalah **penyusunan koleksi di rak** atau yang dikenal dengan istilah ***shelving***. Kegiatan ini melibatkan penempatan bahan pustaka pada rak-rak yang tersedia, sesuai dengan sistem penomoran yang telah ditentukan sebelumnya, yakni berdasarkan **nomor klasifikasi**. Dengan sistem penyusunan ini, pemustaka dapat dengan mudah menemukan lokasi buku yang dicari, karena mereka cukup mencocokkan **nomor panggil** dari katalog dengan penempatan koleksi di rak yang sesuai.

## 3. Pelayanan Perpustakaan

Setelah seluruh tahapan pengolahan bahan pustaka selesai dilaksanakan, koleksi perpustakaan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh para pemustaka. Dalam rangka

mendorong optimalisasi pemanfaatan koleksi, perpustakaan menyelenggarakan berbagai bentuk layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dua bentuk layanan yang umum dijumpai di lingkungan perpustakaan adalah **layanan sirkulasi** dan **layanan referensi**.

### 1. Layanan Sirkulasi

Layanan sirkulasi merupakan bentuk pelayanan yang berkaitan dengan proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Melalui layanan ini, pengguna diberikan kesempatan untuk meminjam koleksi perpustakaan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut *Kamus Istilah Perpustakaan*, layanan sirkulasi mencakup berbagai aktivitas seperti pendaftaran anggota, penetapan tata tertib, pencatatan statistik penggunaan, serta pengelolaan peminjaman dan pengembalian koleksi.

Dalam pelaksanaannya, layanan sirkulasi dapat diselenggarakan melalui dua sistem, yaitu (a) **Sistem Terbuka**: Pengguna diberi kebebasan untuk menelusuri dan mengambil sendiri koleksi dari rak yang tersedia. Sistem ini memberikan keleluasaan kepada pemustaka dalam mencari bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan mereka. (b) **Sistem Tertutup**: Akses pemustaka terhadap rak koleksi dibatasi. Dalam sistem ini, pengguna tidak dapat secara langsung mengambil bahan pustaka, melainkan harus meminta bantuan dari petugas perpustakaan untuk mencarikan koleksi yang dibutuhkan.

### 2. Layanan Referensi

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam narasi awal, layanan referensi umumnya disediakan untuk membantu pengguna dalam mencari informasi yang bersifat spesifik atau mendalam. Layanan ini biasanya dilayani oleh pustakawan yang memiliki keahlian dalam menavigasi sumber-sumber informasi, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Dengan tersedianya kedua jenis layanan ini, perpustakaan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses informasi dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam memanfaatkan koleksi yang tersedia. Layanan referensi merupakan bentuk pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan dengan memanfaatkan koleksi referensi yang tersedia, seperti kamus, ensiklopedia, direktori, buku pegangan (handbook), indeks, bibliografi, dan terbitan resmi pemerintah. Layanan ini mencakup kegiatan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemustaka serta melakukan penelusuran informasi, baik yang tersedia di dalam lingkungan perpustakaan maupun dari sumber eksternal.

Tujuan utama dari layanan referensi adalah memberikan solusi atas kebutuhan informasi yang spesifik dari pengguna. Produk akhir dari layanan ini berupa jawaban atau informasi yang relevan, yang diperoleh melalui penelusuran dan pemanfaatan koleksi referensi yang dimiliki oleh perpustakaan. Dengan demikian, layanan referensi tidak hanya membantu pemustaka dalam menemukan informasi yang dibutuhkan, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara pengguna dan sumber pengetahuan yang tersedia di perpustakaan.

## **Evaluasi Keberhasilan Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pretest dan Posttest**

Sebagai upaya untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat, tim pelaksana melakukan evaluasi sistematis melalui pemberian instrumen pretest dan posttest kepada seluruh peserta pelatihan. Evaluasi ini dirancang guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat pemahaman dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pelatihan. Pretest diberikan pada tahap awal pelaksanaan program dengan tujuan untuk mengidentifikasi latar belakang pengetahuan peserta mengenai materi yang akan dibahas, khususnya terkait manajemen taman bacaan masyarakat. Fokus utama dari pretest adalah untuk menilai pemahaman dasar peserta dalam aspek pengelolaan dan pelayanan perpustakaan atau taman bacaan masyarakat, seperti proses pengolahan koleksi, sistem layanan, dan pemanfaatan sumber informasi.

Sementara itu, posttest diselenggarakan pada akhir rangkaian kegiatan pelatihan.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran peserta, sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyampaian materi oleh tim pelaksana. Selain itu, hasil posttest juga menjadi tolak ukur sejauh mana peserta mampu menyerap dan memahami materi yang telah diberikan selama pelatihan berlangsung.

Instrumen pretest dan posttest disusun berdasarkan materi pelatihan yang telah dirancang sebelumnya dan menggunakan indikator-indikator penilaian yang relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil analisis data dari kedua tes tersebut, diperoleh temuan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam hal pemahaman konseptual dan keterampilan praktis peserta terhadap pengelolaan taman bacaan masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan mampu memberikan dampak positif dalam penguatan kapasitas peserta, baik dari segi teori maupun praktik di lapangan.

Lebih lanjut, hasil evaluasi ini juga menjadi dasar bagi tim pelaksana untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut program, termasuk pengembangan materi pelatihan yang lebih aplikatif, peningkatan metode penyampaian, serta perencanaan program pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, program pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan literasi informasi masyarakat melalui optimalisasi fungsi taman bacaan dan perpustakaan desa sebagai pusat pembelajaran komunitas.

Selain pelaksanaan pretest dan posttest, keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat juga diukur melalui evaluasi menyeluruh terhadap keseluruhan kegiatan. Evaluasi akhir ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada para peserta, yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup mengenai berbagai aspek pelatihan. Aspek-aspek tersebut meliputi kesesuaian materi yang disampaikan, ketepatan waktu pelaksanaan, ketersediaan sarana dan prasarana, penggunaan media pembelajaran, serta penilaian terhadap kinerja tutor atau narasumber yang menyampaikan materi pelatihan.

Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Mereka menyatakan bahwa materi pelatihan yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan mereka di lapangan. Selain itu, peserta juga mengungkapkan bahwa pelatihan ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam hal pengelolaan perpustakaan desa, dengan penekanan pada aspek penyediaan dan pengelolaan informasi kebencanaan. Temuan ini memperkuat bahwa program pelatihan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dalam mendukung literasi informasi kebencanaan di tingkat komunitas.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan daring dan luring. Materi pelatihan mencakup tiga topik utama, yakni pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, dan layanan perpustakaan. Penyampaian materi secara daring terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, memungkinkan adanya kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan peserta pelatihan secara virtual. Sementara itu, kegiatan luring dilaksanakan dengan menggandeng pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pankton yang berlokasi di wilayah Pasar Pananjung, Kabupaten Pangandaran. Pelatihan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep dasar pengelolaan perpustakaan, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam menerapkan materi yang diberikan secara langsung.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta pelatihan. Pengelola perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai strategi pengembangan koleksi, serta memiliki kemampuan dalam proses teknis pengolahan bahan pustaka seperti klasifikasi, katalogisasi, pelabelan, dan penyusunan koleksi di rak. Selain itu, mereka juga menunjukkan peningkatan dalam mengelola layanan perpustakaan, baik layanan sirkulasi maupun referensi. Pelatihan ini tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan taman bacaan masyarakat sebagai pusat literasi, tetapi juga mendorong peran strategisnya dalam penyediaan informasi yang relevan,

terutama yang berkaitan dengan literasi kebencanaan di lingkungan setempat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DRPMI Unpad, seluruh jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, khususnya jajaran BPBD Kab. Pangandaran, dan seluruh pihak yang mendukung jalannya pengabdian pada masyarakat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ayong, D. A., Bugre, C., & Baada, F. N.-A. (2020). An evaluation of the library connectivity project through the lens of the digital inclusion model. *Information and Learning Science*, 121(11), 805-827. doi:<https://doi.org/10.1108/ILS-02-2020-0047>
- Ozili, P. K. (2020). *Social inclusion and financial inclusion: international evidence*. Germany: Library of Munich.
- Bridge, C., & Carnemolla, P. (2014). An enabling BIM block library: an online repository to facilitate social inclusion in Australia. *Construction Innovation*, 14(4), 477-492.
- Brown, L. M., Haun, J. N., & Peterson, L. (2014). A proposed disaster literacy model. *Disaster medicine and public health preparedness*, 8(3), 267-275.
- Fujiwara, D., Lawton, R. N., & Mourato, S. (2019). More than a good book: Contingent valuation of public library services in England. *Journal of Cultural Economics*, 639-666. doi:<https://doi.org/10.1007/s10824-019-09369-w>
- Gunawan, A. (2017). Pengembangan Koleksi Pada Perpustakaan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perikanan. *Jurnal Pari*, 2(1), 31-42.
- Irsan. (2019). Transformasi perpustakaan umum sebagai ruang pelibatan masyarakat: Studi kasus: Dinas.
- Lasa, H. S. (2007). *Manajemen perpustakaan sekolah*. Yogyakarta: Pinus book publisher.
- Saepudin, E. (2023). Literasi Media Sebagai Sarana Pembelajaran Anak Usia Dini. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 12(2), 189-198.
- Siregar, B. (1999). *Pembinaan Koleksi Perpustakaan dan Pengetahuan Literatur*. Medan: Proyek Pembinaan Perpustakaan Sumatera Utara.
- Subekti, P. B. (2022). Peningkatan pengetahuan kebencanaan masyarakat pangandaran dalam mewujudkan masyarakat tahan bencana. *Dinamisia: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 6(2), 346-352.
- Utami, D., & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. *VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 21(1), 31-38.